

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	126 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 930.915.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 930.915.000,-

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Freddy Harris
NIP. 196611181994031001



Agus Toyib
NIP. 1963061/1985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

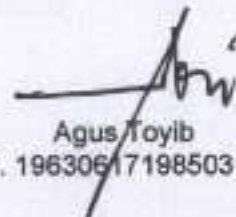
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

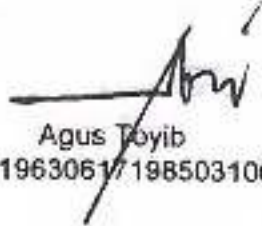
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 282.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 262.000.000,-


Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



Widodo Ekajajana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib

NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Mualimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	65% 35%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	15% 50% 75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah 1 Instansi Pemerintah 2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 233.984.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 233.984.000,-

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten


Agus Toyib
NIP. 196305171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Benny Riyanto
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi bersama Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai dengan Tusi BPHN)	3,1
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77,0
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79,0
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25
2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 98,001.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 98,001.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2,125,755.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2,125,755.000,-

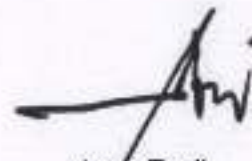
Jakarta, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 4 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

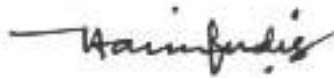
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 199.428.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 199.428.000,-

Jakarta, 5 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Agus Toyib
NIP. 196306171985031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Toyib

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten

Agus Toyib
NIP. 196306171985031002